



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO SUTRISNO
2. Jabatan : KEPALA PROGRAM STUDI S2 AGRIBISNIS
3. NHK : 694353

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.069.254.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 93.510.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 93.510.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/56 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 149.318.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/56 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 149.138.000
5. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 221.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/60 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 223.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/46 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 139.778.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 296.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX 4X2 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. MOTOR, HONDA AFX12U21C08 M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000



4. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	70.664.461
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.435.918.461
III. HUTANG	Rp.	82.813.363
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.353.105.098

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.